

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) dengan menggunakan variabel dependen komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial. Dimana pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam pengujian parsial menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Putri (2014) dengan variabel dependen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Penelitian yang dilakukan menggunakan *Modified Jones Model* untuk menghitung akrual diskresioner yang menjadi proksi dari manajemen laba. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur

yang teregistrasi di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan metode purposive sampling akan menjadi sampel dalam penelitian. Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun dua mekanisme GCG lainnya, yakni kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba.

Karuniasih (2013) dengan penelitian pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan dimana sampel dalam penelitian menggunakan 23 perusahaan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan Top Share bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan Top Share tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Pudjolaksono (2013) tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik *earning management* badan usaha sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.2 Teori Keagenan (*Agency Teori*)

Perspektif dalam hubungan keagenan merupakan dasar dalam memahami *corporate governance*. Dalam perkembangan perekonomian saat ini, manajemen dengan pengelolaan perusahaan akan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan agen yang sering terjadi. Tujuan dari pemisahan pengelolaan dengan kepemilikan perusahaan adalah agar keuntungan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan dengan keuntungan yang semaksimal mungkin dan biaya yang efisien dengan dikelolanya perusahaan oleh manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan *agency theory* adalah sebuah bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Dengan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban kinerja, maka pemilik perusahaan dapat mengukur, menilai dan mengawasi sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai serta mempertahankan kemakmuran perusahaan.

Setiawan (2009) teori keagenan merupakan teori tentang kepemilikan dan pendelegasian pengelolaan (kontrak), yang memandang keberadaan suatu perusahaan sebagai hasil dari *quasi* perjanjian antara berbagai pihak, antara lain, manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah serta masyarakat. Teori keagenan ini menjelaskan tentang hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh dua pihak, yaitu pihak yang mendelegasikan pekerjaan atau *principal* dan pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan atau *agent*, dimana

principal menggunakan *agent* untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal*.

Teori keagenan dilandai oleh beberapa asumsi (Eisenhard, 1989 dalam Agustia, 2013). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Sehingga asumsi sifat manusia menekankan, bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang dan menghindari diri dari resiko. Dengan demikian sebagian manusia akan mementingkan dirinya sendiri untuk memuaskan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan lainnya. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan prinsipal akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976).

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan adalah dengan menerapkan monitoring melalui tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dimana *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholders* dan diharapkan dengan pengelolaan *corporate governance* pada perusahaan dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.3 *Corporate Governance*

2.3.1 *Definisi Corporate Governance*

Dalam sebuah tata kelola suatu perusahaan terdapat rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang akan memengaruhi terhadap suatu pengarahan, pengelolaan juga pengontrolan dalam suatu perusahaan ataupun korporasi. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan yang dibuat oleh manajemen untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan (Baridwan, 2004:17)

Dalam tata kelola suatu perusahaan memiliki hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan suatu perusahaan. Suatu perusahaan memiliki pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola suatu perusahaan diantaranya pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi serta pemangku kepentingan lainnya diantaranya karyawan, pemasok, pelanggan, bank, kreditor lain, regulator, lingkungan maupun masyarakat luas. Menurut Komite Cadbury (1992) dalam Agustia (2013), *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder*.

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam (Imaniyati, 2009;231) mendefinisikan *corporate governnace* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan,

pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

(Imaniyati, 2009;232) mengemukakan bahwa secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurnagi resiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dalam (Imaniyati, 2009;232) bahwa survey yang dilakukan oleh McKinsey & Co menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja financial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*).

Sehingga dalam efisiensi ekonomi yang baik akan menunjukkan tata kelola dengan mengoptimalkan hasil ekonomi perusahaan serta memperhatikan kesejahteraan para pemegang saham.

2.3.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance

Agar dalam *corporate governance* dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaaf bagi kesejahteraan perusahaan maka untuk melancarkan kegiatan *corporate governance* tersebut, terdapat prinsip-prinsip *corporate governance* guna mencapai tujuan dari *corporate governance* itu sendiri.

Imaniyati (2009;233) secara ringkas prinsip *corporate governance* dirangkum sebagai berikut :

1. *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam' *self-dealing*, dan pemilik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi wajar/pengungkapan penuh material manapun; mengedepankan *EqualJob Oppotunity*.

2. *Disclosure dan Transparency* (Transparansi)

Hak-hak pemegang shaam, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keberuntungan perusahaan. Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya telah transparansi mengenai semua hal yang penting agi kinerja perusahaan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi

(*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan mengungkapkan yang berkualitas; mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MSI) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dalam proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah dikuantifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) didasarkan atas of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komsaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategi berdasarkan *best practices* (bukan sekedar auit). Transformasi menjadi “*Risk-based*” Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*); penegakan hukum (sistem

penghargaan dan saksi); penggunaan eksternal auditor yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kera sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Dengan adanya prinsip-prinsip *corporate governance* diharapkan praktik *corporate governnace* dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan. Juga mampu mengurangi sebuah tindakan asimetri yang dilakukan manajemen (*agent*) kepada pemilik (*principal*) sehingga dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan manjaemen laba dalam rangka mensejahterahkan kepentingan pribadi.

2.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan adanya manfaat *good corporate governnace* dalam suatu perusahaan dapat mengatur dan memisahkan antara pembagian tugas baik dalam hak maupun kewajiban terhadap keberlangsungan kehidupan perusahaan. Sehingga para pemegang saham, dewan pengurus, para manager juga pemegang saham maupun non-pemagang saham dapat berjalan sesuai dengan harapan. Maka dari itu beberapa manfaat dari *Good Corporate Governance* (Putra, 2007 dalam Zuliah, 2011) adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggungjawabkan pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa pengawasan yang timbul untuk memcegah terjadinya hal tersebut
2. Mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunya tingkat resiko perusahaan
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa

mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan dan dapat berjalan dengan baik serta efisien, mampu meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham maupun investor juga membantu memaksimalkan sumber daya yang efisien dalam suatu perusahaan tersebut.

2.3.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) dalam Widiatmaja (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba (Boediono, 2005 dalam Widiatmaja, 2010). Dengan adanya mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat menjadi suatu sistem yang dapat mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan sehingga dapat memberikan dan

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* dilihat dari, komite audit, kepemilikan insitutional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial.

2.3.4.1 Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2014 dalam Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Nasution dan Setiawan (2007) keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk komite audit, anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit dan anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Zarkasyi (2008:16) menyatakan suatu kelompok yang sifatnya independent atau tidak memiliki kepemilikan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

Siallagan dan Machfoedz (2006) mengatakan bahwa komite audit yang dibentuk dalam perusahaan sebagai komite khusus diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh dewan

komisaris. Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan, *discretionary accruals* semakin rendah, yang berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

2.3.4.2 Komisaris Independen

Peran komisaris independen dalam suatu perusahaan tidaklah kalah penting dengan komite audit independen, karena dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan. Klien (2002) dalam Zulia (2011) dalam penelitiannya membuktikan bahwa besarnya *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen dibanding perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri banyak komisaris independen. Dewan komisaris independen sendiri merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan afliasinya. Sehingga semakin banyak proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin baik fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Tugas dari dewan komisaris independen dalam perusahaan sendiri dapat mengawasi kualitas informasi yang terkandung dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu dewan komisaris dapat mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 dalam Nasution dan Setiawan (2007) adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik monitor efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance.

Untuk memastikan komisaris independen dapat menjalankan tugasnya secara independen. Komisaris independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut (Hastuti, 2011 dalam Juliana, 2014) :

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*)
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap di perusahaan lainnya yang berafiliasi dengan perusahaan tercatat bersangkutan
4. Komisaris independen harus mengerti perundang-undang di bidang pasar modal
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas bukan pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
6. Bebas dari segala kepentingan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikiri independen demi kepentingan perusahaan

2.3.4.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment

banking (Sylvia dan Sindharta, 2005 dalam Widiatmaja, 2010). Noorlaila (2011:23) menyatakan bahwa kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang sebesar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, sehingga dengan adanya kepemilikan institusional akan memberikan dampak positif kepada perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional dan kepemilikan individu merupakan kepemilikan yang berada pada suatu perusahaan, ataupun gabungan antara keduanya dengan proporsi tertentu. Maharani (2015) investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu :

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih dari pada investor individual untuk mendapatkan informasi
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi
3. Investor institusional secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2.3.4.4 Kepemilikan Manajerial

Dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan sangatlah penting, dimana dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengatasi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007)

Gunarsih (2004) dalam Juliana (2014) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan perusahaan. Sehingga untuk dapat mengatasi masalah keagenan dapat meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Dan dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dimana adanya kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada suatu perusahaan.

Putri (2006) dalam Juliana (2014) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Sehingga kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung

manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Tungal dan Tungal (2002) dalam Setiawan (2009) menyatakan kepemilikan manajerial itu lebih merupakan kompensasi bagi manajer, melalui kompensasi ini kepentingan manajer dan kepentingan pemilik diselaraskan.

2.3.5 Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) dalam definisi sempit hanya berkaitan dengan pemulihan metode-metode akuntansi. *Earnings management* dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*. Sedangkan dalam definisi luas, *earnings management* adalah merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan pada saat ini atas suatu unit dimana manajer yang akan bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut (Nafiah, 2013). Sehingga dalam tindakan suatu manajemen laba akan dapat mempengaruhi suatu angka laba yang dilaporkan. Scott (2006:344) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan *accrual* dalam menyusun laporan keuangan.

Healy dan Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan

penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Scott (1997) manajemen laba dibagi menjadi dua, pertama melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak utang, dan *political costs* (*opportunistik earnings management*). Kedua dengan memandang manajemen laba dari perpektif *efficient contracting* (*Efficient earnings management*) dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Dari pendapat tentang manajemen laba oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan manajemen laba merupakan suatu permainan manajerial dalam memanipulasi suatu laporan keuangan dengan cara mengatur besar kecilnya laba perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara Davin (2005) dalam Nafiah (2013) menyebutkan bahwa terdapat tujuh permainan manajerial untuk memanipulasi laporan keuangan yaitu dengan jalan :

1. Mencatata pendapatan terlalu cepat
2. Mencatata pendaptan palsu
3. Mengakui pendapatan lebih cepat selama suatu periode
4. Mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelum atau sesudahnya

5. Tidak mengungkapkan semua kewajibannya
6. Mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya
7. Mengakui pendapatan masa depan menjadi pendapatan periode berjalan.

2.3.5.1 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba

Dalam positif *accounting theory* terdapat tiga hipotesis yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) dalam Rahmawati dkk (2006) yaitu :

1. *Bonus plan hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan

2. *Debt covenant hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal

3. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil

tindakan, misalnya : mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

2.3.5.2 Teknik dan Pola Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Suryani (2010) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak terwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain
2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.3.5.3 Motivasi Manajemen Laba

Tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer sangat berdampak buruk terhadap perkembangan perusahaan sehingga dapat merugikan perusahaan. Maharani (2015) menjelaskan manajemen laba dapat dilihat dari 2 sudut pandang, sudut pandang yang pertama yaitu laporan keuangan. Dalam sudut pandang laporan keuangan, manajer melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan. Sudut pandang kedua yaitu dilihat dari perjanjian kontrak, alasan manajer melakukan manajemen laba secara opportunistic untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dimana akan menjadi biaya pihak lain dalam perjanjian kontrak.

Scott (2006) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba seperti berikut ini :

1. Rencana bonus (*Bonus scheme*)

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya

2. Kontrak utang jangka panjang (*Debt covenant*)

Ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan alat periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang

3. Motivasi politik (*Political motivation*)

Ini menyatakan perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah

4. Motivasi perpajakan (*Taxation motivation*)

Ini menyatakan perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar

5. Pergantian CEO (*Chic/Executive Office*)

Biasanya CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategis memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindarkan diri dari pemecahan sehingga mereka cenderung untuk memaksimalkan jumlah laba yang dilaporkan

6. Penawaran saham perdana (*Initial public offering*)

Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada publik, informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektur merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh

para investor maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Dalam suatu perusahaan memerlukan pengawasan dalam laporan keuangannya maka dari itu akan terbentuknya satu komite audit dalam perusahaan, dimana komite audit tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam hal pengawasan laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan meningkatkan kualitas laba perusahaan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

Klein (2002) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Widiatmaja (2009) menemukan bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan, *discretionary accruals* semakin rendah yang berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Siallagan dan Machfoedz (2006:7) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak

tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Dari penjelasan diatas maka komite audit dalam suatu perusahaan dapat mengurangi tindakan atau aktivitas manajemen laba yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas pelaporan keuangan yang berdampak pada kualitas laba perusahaan. Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut.

H1 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dalam suatu perusahaan adanya dewan komisaris dapat mengawasi aktivitas sistem pengelolaan internal perusahaan. Widiatmaja (2010) pengawasan oleh dewan komisaris akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham maka mereka harus mewakili kepentingan para pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen.

Di samping itu, apabila terjadi perselisihan antara para manajer internal dan pengawasan kebijakan oleh manajemen serta pemberian nasihat yang diberikan kepada manajemen maka diperlukan pihak ketiga yang independen untuk dapat menjadi pihak penengah dalam penyelesaian masalah tersebut. Maka suatu komisaris independen merupakan pihak ketiga yang baik untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance*. Sehingga fungsi dalam monitoring yang dilakukan oleh

dewan komisaris dapat berjalan dengan baik dapat dipengaruhi dengan jumlah ataupun ukuran dewan komisaris itu sendiri dalam suatu perusahaan.

Namun ukuran dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja dan hasil yang diberikan. Penelitian yang dilakukan Nasution dan Setiawan (2007) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar karena jumlah personel yang sedikit dapat menghambat munculnya masalah keagenan yang bila dibiarkan akan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat monitoring kegiatan manajemen karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cornett (dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Masih menurut Cornnet, jika anggota dewan komisaris meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya *discretionary accruals*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komsaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif, hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komsaris maka makin banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dari beberapa uraian tersebut

maka jumlah ukuran dewan komisaris yang lebih sedikit akan lebih efektif dalam mengurangi tindakan manajemen laba dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris yang banyak. Maka dari itu hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini adalah.

H2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Dalam kepemilikan institusional dapat mengendalikan pihak manajemen dalam tindakan manajemen laba melalui proses monitoring yang dilakukan. Karena sebagian besar investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam kepemilikan sahamnya. Gideon (2005) dalam Ujjiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Dalam hubungannya dengan fungsi monitor investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Fidyati, 2004 dalam Widiatmaja, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Midiastuty (2005) dalam Widiatmaja (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi manajemen laba. Investor institusional diasumsikan sebagai investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa yang lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh

manipulasi manajemen, oleh karena itu manajer akan menghindari tindakan manajemen laba sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Sehingga dengan adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak investor akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri .

Maka dari itu dengan adanya kepemilikan institusional dapat menekan tindakan manajemen laba yang dapat merugikan perusahaan. Sehingga berdasarkan dengan uraian tersebut, maka hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut.

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Terdapatnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja dan nilai suatu perusahaan itu sendiri. Dalam kepemilikan manajerial memiliki peran penting dalam perusahaan, dimana kepemilikan manajerial juga menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang digunakan pada perusahaan. Jansen dan Meckling (1976) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidak selarasan kepentingan

antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Putri (2014) dimana kepemilikan manajer mampu menurunkan tindakan manajemen laba, dimana besarnya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan akan menurunkan tindakan manajemen laba karena hal tersebut membuat manajer akan melindungi sahamnya agar tidak jatuh dengan cara tidak melakukan tindakan manajemen laba.

Besarnya kepemilikan dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan dapat meningkatkan kualitas laba maupun laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemilik, maka manajer tidak akan melakukan tindakan kecurangan dalam memanipulasi suatu informasi guna melakukan manajemen laba. Sehingga apabila kepemilikan manajerial tinggi, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan turun, namun sebaliknya apabila kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan tinggi. Dari penjelasan di atas maka, hipotesis yang keempat dalam penelitian ini adalah

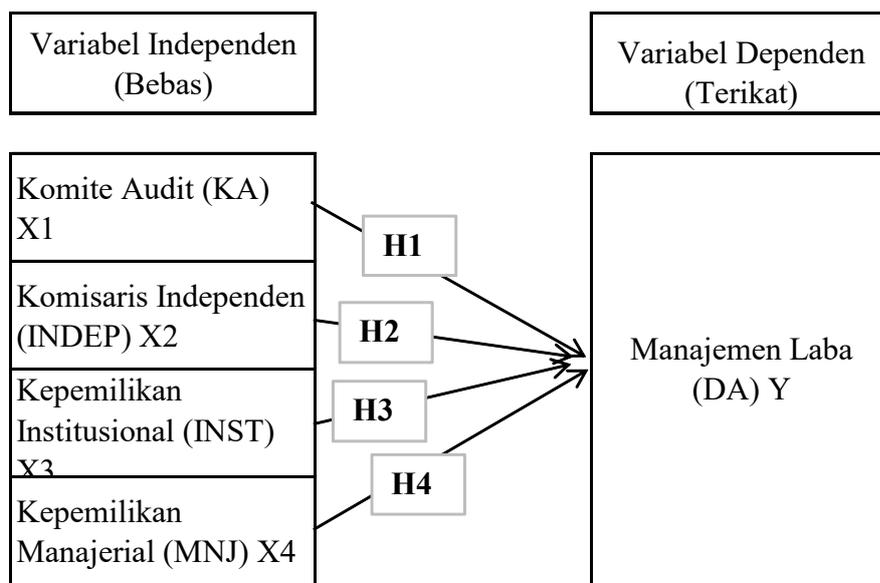
H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.5 Kerangka Konseptual

Perusahaan yang melakukan manipulasi terhadap *earnings* yang dilakukan oleh manajemen, sehingga perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan praktek manajemen laba. Diterapkan *corporate governance*

dalam perusahaan diharapkan dapat memberi banyak informasi sehingga dapat meningkatkan nilai dan laba perusahaan.

Sehingga kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Dari kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu mekanisme yang dapat meminimalkan tindakan manajemen laba adalah komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen dan kepemilikan manajerial diduga dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh dewan komisaris dan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen serta pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepat.

Adanya komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih ketat. Adanya kepemilikan institusional maka tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak investor dapat

mendorong manajer untuk lebih memfokuskan terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan dengan adanya kepemilikan manajerial dari pihak eksternal lebih tinggi dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas laba, sehingga manajer dapat berhati-hati dalam mengelola perusahaan.